



### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2013

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) DKI JAKARTA 2013 SEBESAR 71,18 DARI SKALA 0 SAMPAI 100, ANGKA INI TURUN 6,54 POIN DIBANDINGKAN DENGAN IDI DKI JAKARTA 2012 SEBESAR 77,72.

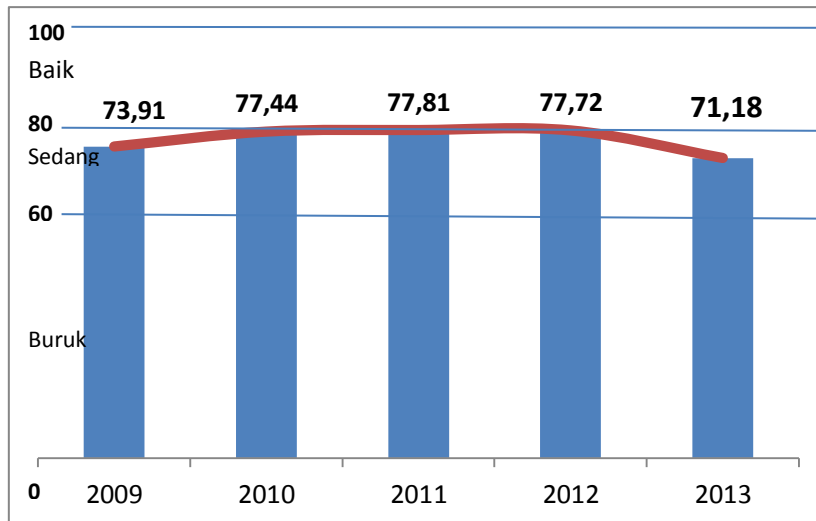
- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DKI Jakarta 2013 sebesar 71,18 dari skala 0 sampai 100, angka ini turun 6,54 poin dibandingkan dengan IDI DKI Jakarta 2012 sebesar 77,72. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
- Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) yang naik 0,61 poin dari 88,11 pada 2012 menjadi 88,72 pada 2013, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) sebesar 55,08 turun 7,44 poin dibandingkan dengan 2012 yang sebesar 62,52, dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) yang turun 14,12 poin dari 88,81 pada 2012 menjadi 74,69 pada 2013.
- Secara metodologis dalam pengumpulan data digunakan 4 sumber data berupa : (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

#### 1. PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2013

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 sebesar **71,18** (skala 0 sampai 100), angka ini turun **6,54** poin dibandingkan tahun 2012 sebesar 77,72. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang.

Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2011 di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar 73,91; 2010 sebesar 77,44, dan 2011 sebesar 77,81, namun kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 77,72 dan pada tahun 2013 kembali turun menjadi 71,18. Meskipun demikian, tingkat demokrasi DKI Jakarta berdasarkan penghitungan Indeks sejak tahun 2009 hingga 2013 tetap masih berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan IDI sebagai sebuah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan IDI merupakan refleksi realitas yang terjadi.

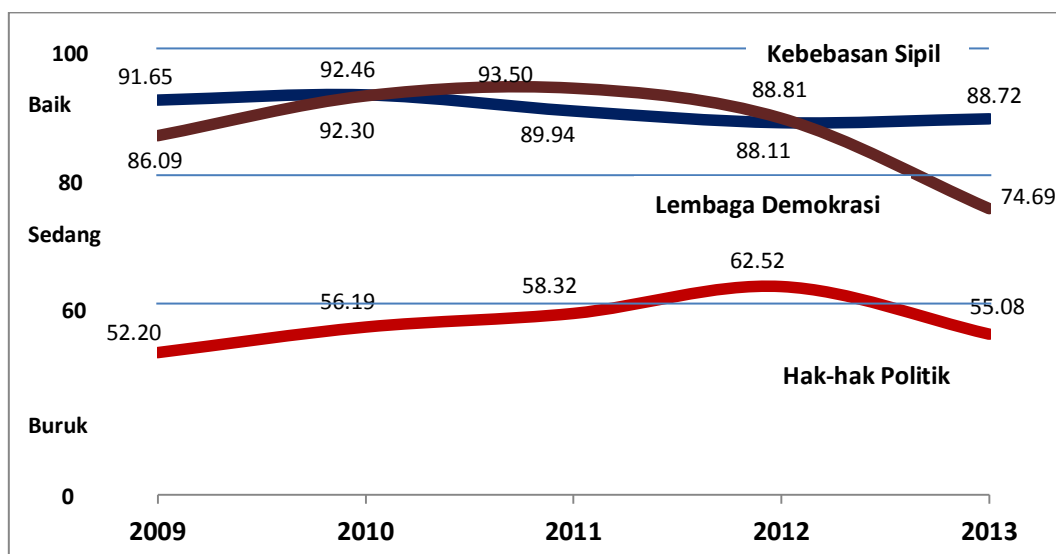
**Grafik 1. Perkembangan IDI DKI Jakarta, 2009-2013**



Angka IDI 2013 Provinsi DKI Jakarta merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil 88,72; aspek hak-hak politik 55,08; dan aspek lembaga demokrasi 74,69.

Secara lebih rinci, pada tahun 2013 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012, berturut-turut 7,44 dan 14,12 poin. Sementara nilai indeks Kebebasan sipil cenderung mengalami sedikit perubahan yaitu 88,81 pada tahun 2012 menjadi 88,72 pada tahun 2013.. Walaupun terjadi penurunan indeks, pola sebaran nilai masih sama dengan tahun pengukuran sebelumnya, yaitu kebebasan sipil secara umum terkategori “baik”. Sedangkan untuk lembaga demokrasi pada tahun 2013 berubah menjadi “sedang” yaitu pada tahun 2012 sebesar 88,11 (yang berkategori “baik”) menjadi sebesar 74,69, sementara aspek hak-hak Politik menjadi “buruk”. Dari data IDI 2013 diperoleh informasi pada aspek hak-hak politik masih terdapat kecenderungan penyampaian aspirasi dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti merusak dan memblokir.

**Grafik 2. Perkembangan Indeks Aspek IDI DKI Jakarta, 2012-2013**



Dari sisi variabel, pada IDI tahun 2013 terdapat dua variabel yang mengalami peningkatan skor dibanding tahun 2012 diantaranya kebebasan berkumpul dan berserikat yang naik 43,75 poin dari 55,00 menjadi 98,75 dan peran DPRD yang juga naik 5,49 poin dari 61,89 menjadi 67,38. Sementara itu, terdapat lima variabel yang mengalami penurunan skor yakni Kebebasan Berpendapat turun 22,23 poin dari 90,00 menjadi 67,77; Kebebasan dari Diskriminasi turun 4,17 poin dari 74,32 menjadi 70,15; Hak memilih dan dipilih turun 0,34 poin dari 52,98 menjadi 52,64, Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan turun 14,54 poin dari 72,06 menjadi 57,52 dan Peran partai politik turun 77,14 poin dari 87,14 menjadi 10,00. Sementara itu, lainnya tidak mengalami perubahan atau relatif sama.

**Tabel 1. Perkembangan Skor Variabel IDI DKI Jakarta, 2012-2013**

No	Nama Variabel	2012	2013
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	55,00	98,75
2	Kebebasan Berpendapat	90,00	67,77
3	Kebebasan Berkeyakinan	98,21	98,21
4	Kebebasan dari Diskriminasi	74,32	70,15
5	Hak Memilih dan Dipilih	52,98	52,64
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	72,06	57,52
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	100,00	100,00
8	Peran DPRD	61,89	67,38
9	Peran Partai Politik	87,14	10,00
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	99,93	99,93
11	Peran Peradilan yang Independen	95,00	95,00

Dari sisi indikator, pada IDI tahun 2013 terdapat 15 indikator yang mengalami kinerja baik (merupakan indikator yang memiliki skor di atas 80) diantaranya yaitu indikator 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, dan 28 (lihat tabel 2 perkembangan skor indikator 2012 dan 2013). Kendati demikian, masih terdapat masalah kronis yang ditunjukkan melalui indikator 4, 13, 21, 22, dan 23 (merupakan indikator yang memiliki skor di bawah 50), diantaranya adalah indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, kualitas daftar pemilih tetap (DPT), rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh parpol. Oleh karena itu, indikator tersebut memerlukan perhatian khusus agar nilainya dapat membaik.

**Tabel 2. Perkembangan Skor Indikator 2012 dan 2013**

Nomor	Indikator	2012	2013
<b>Kebebasan Sipil</b>			
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	50,00	100,00
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	90,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	90,00	73,33
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	90,00	40,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	90,00	90,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	50,00	50,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst	90,00	75,00
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender	90,00	90,00
<b>Hak-Hak Politik</b>			
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	100,00	100,00
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	50,00	50,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00
14	Voters turnout	56,90	56,90
15	% Perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	84,56	78,01
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	90,00	55,22
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	54,13	59,82
<b>Lembaga Demokrasi</b>			
18	Keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu	100,00	100,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	100,00	100,00
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	83,55	99,40
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	0,00	5,88
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	7,14	3,57
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	85,71	0,00
24	% perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol	99,85	99,85
26	Keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu	100,00	100,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	90,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	90,00	100,00

**Tabel 3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2012-2013**

Provinsi	IDI 2013				IDI 2012			
	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	IDI	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3
Aceh	63,56	71,78	48,59	76,97	54,02	60,16	47,16	57,21
Sumatera Utara	58,80	73,65	49,50	54,90	58,51	73,85	49,82	53,01
Sumatera Barat	54,11	54,88	38,97	77,17	60,82	57,10	50,85	81,32
Riau	68,37	77,71	52,19	82,32	67,00	80,21	47,16	81,89
Jambi	64,41	84,95	41,91	74,34	68,81	86,23	46,60	82,18
Sumatera Selatan	67,12	91,45	50,32	63,22	73,17	93,26	55,21	76,42
Bengkulu	59,17	71,57	49,28	59,28	61,70	77,76	48,93	61,79
Lampung	63,13	70,75	45,47	81,58	72,26	94,14	50,60	79,16
Kep. Bangka Belitung	68,79	85,16	50,60	77,09	69,37	83,09	51,21	80,97
Kepulauan Riau	66,50	80,08	49,63	76,21	65,61	82,68	49,98	68,95
DKI Jakarta	71,18	88,72	55,08	74,69	77,72	88,11	62,52	88,81
Jawa Barat	65,18	79,84	46,74	76,05	57,05	65,93	46,58	62,51
Jawa Tengah	60,84	79,18	46,29	60,89	63,79	75,03	46,29	77,46
D.I.Yogyakarta	72,36	90,78	50,65	83,69	72,96	87,39	55,52	82,52
Jawa Timur	59,32	71,37	35,43	82,10	54,99	80,97	36,17	52,22
Banten	69,79	81,39	51,03	85,00	65,29	79,20	51,03	70,42
Bali	72,22	92,55	52,87	77,38	71,75	94,18	45,00	86,01
Nusa Tenggara Barat	57,22	59,68	49,60	66,24	57,97	58,31	49,60	70,85
Nusa Tenggara Timur	73,29	95,59	58,83	68,23	72,67	91,06	50,89	84,15
Kalimantan Barat	67,52	97,54	49,36	58,61	65,38	92,37	37,18	76,23
Kalimantan Tengah	64,15	81,89	50,69	63,21	65,78	68,44	51,05	85,82
Kalimantan Selatan	61,52	58,03	56,35	74,12	61,13	49,51	52,59	89,33
Kalimantan Timur	68,13	92,14	55,36	58,20	71,23	97,16	51,69	69,68
Sulawesi Utara	73,11	92,44	62,55	65,56	76,50	95,64	58,65	80,77
Sulawesi Tengah	64,50	90,03	36,78	76,44	64,97	93,43	37,65	72,55
Sulawesi Selatan	65,20	81,30	50,62	68,10	68,55	87,07	43,74	84,66
Sulawesi Tenggara	52,61	84,32	28,95	50,32	57,26	91,39	29,50	58,44
Gorontalo	67,21	79,31	58,26	66,22	59,37	73,25	50,76	55,59
Sulawesi Barat	64,02	88,51	44,05	64,94	63,65	88,67	35,92	76,22
Maluku	66,23	81,52	50,53	71,95	59,68	76,05	45,08	62,27
Maluku Utara	64,06	83,67	48,94	63,40	66,83	88,15	50,13	66,55
Papua Barat	60,70	92,33	35,93	60,26	65,70	94,42	45,74	61,27
Papua	60,92	90,21	31,37	71,01	60,71	91,11	32,99	66,50
<b>INDONESIA</b>	<b>71,18</b>	<b>79,00</b>	<b>46,25</b>	<b>72,11</b>	<b>77,72</b>	<b>77,94</b>	<b>46,33</b>	<b>69,28</b>

Catatan :

Aspek 1 : Kebebasan Sipil

Aspek 2 : Hak-hak Politik

Aspek 3 : Lembaga Demokrasi

## 2. CATATAN TEKNIS

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia itulah maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama *stakeholder* lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf, Prof Musdah Mulia, Dr. Syarif Hidayat, dan Dr. Abdul Malik Gismar merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi, diantaranya adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level DKI Jakarta, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Pengumpulan data IDI mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis seperti Perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *focus group discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data-data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang indikator IDI. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

### Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2013

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dlm Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI harus melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI DKI Jakarta. Ketiga tahapan ini secara hierarki terkait satu dengan yang lain. Indeks masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI DKI Jakarta.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritis dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).



## *BPS PROVINSI DKI JAKARTA*

Informasi lebih lanjut hubungi :

**Ir. Sri Santo Budi M, MA**  
**Kepala Bidang Statistik Sosial**

Telepon : 021-31928493, 31928496

Fax : 021-3152004

e-mail : [bps3100@bps.go.id](mailto:bps3100@bps.go.id)

Homepage : <http://jakarta.bps.go.id>